RENJA

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2022

2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

http://perindag.babelprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, berpedoman pada a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, b. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, c. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, d. Renstra 2017-2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan urusan industri dan perdagangan, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis saat ini dan sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam Renja 2022 terdapat Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja/menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini menuntut kepiawaian seluruh unsur pimpinan untuk melakukan inovasi, kreativitas dan terobosan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas dapat dicapai sesuai dengan tahapan yang ditentukan.

Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan

dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya.

Pangkalpinang, Maret 2021

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. H. SUNARDI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19631223 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
B A B I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perindustrian 5
B A B II 9
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9
2.1.1. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 9
Tabel 2.1.1. Rekapitulasi APBD dan APBD-Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 10
Tabel 2.1.2. Rekapitulasi Dana APBN (Dekonsentrasi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 10
2.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 10
2.1.3. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 11
Tabel. 2.1.3.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan s.d Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 26
Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 27
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 31
2.3.1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 31

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 2022.....37

Tabel 2.4.1 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...38

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....68

Tabel 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....69

B A B III.....70

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....70

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.....70

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 71

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 71

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disperindag Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 73

BAB IV.....87

PENUTUP 87

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah. Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada tahun 2022, perencanaan ini menyesuaikan permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Demikian pula halnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Rencana Kerja ini pun merupakan kolaborasi dari sistem perencanaan pembangunan Tahunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan hasil proses panjang pada kesepakatan program dan kegiatan mulai dari penyelenggaraan Forum OPD, pra Musrenbang sampai dengan Musrenbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yang mencakup rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah :

1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan urusan Industri dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan pilihan Industri dan Perdagangan baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas urusan Industri dan Perdagangan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perindustrian

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menjabarkan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 dan realisasi Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menjabarkan indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan analisis capaian kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menguraikan Permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan serta kaitannya dengan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Menguraikan evaluasi kinerja hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menggambarkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022;

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, berisikan penjelasan ;

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
d. Tabel rencana Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

B A B II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

Berbagai kebijakan dan upaya yang akan dilakukan pemerintah dan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 diharapkan lebih fokus pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target, oleh karena itu, perkembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun review hasil evaluasi kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, sebagai berikut :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.1.1 Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

Urusan pilihan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di APBD Induk sebesar Rp. 25.014.216.359,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp.12.285.197.779,00 sedangkan belanja langsung sebesar Rp.12.729.018.580,00. Pada APBD perubahan tahun 2020, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan berubah menjadi Rp. 21.997.113.949,00 (mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.017.102.410,00) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp.11.984.610.979,00 (mengalami pengurangan sebesar Rp. 300.586.800,00) dan belanja langsung sebesar Rp. 10.012.502.970,00 (mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.716.515.610,00).

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi APBD dan APBD-Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Belanja	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	12.285.197.779,00	11.984.610.979,00	11.656.561.724,00	97,26
Belanja Langsung	12.729.018.580,00	10.012.502.970,00	8.944.446.472,00	89,33
Total Belanja	25.014.216.359,00	21.997.113.949,00	20.601.008.196,00	93,65

Tabel 2.1.2. Rekapitulasi Dana APBN (Dekonsentrasi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Kementerian	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian RI	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.201.215.000	1.193.002.633	99,32
2.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	797.834.000	642.990.000	80,59
3.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	236.942.000	219.509.074	92,64
			2.235.991.000	2.055.501.707	91,93

2.1.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2020 urusan perindustrian dan perdagangan pada Belanja Langsung APBD Induk dilaksanakan melalui 6 (enam) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dan pada APBD Perubahan menjadi 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.012.502.970,00 dengan Realisasi serapan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.944.446.472,00 atau 89,33%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.068.056.498,00 atau 10,67 %.

2.1.3 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang disajikan pada table Tabel 2.1.3.1.

Tabel. 2.1.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan s.d Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Disperindag tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperindag s.d. 2020	
								Target Renja Disperindag Tahun 2019	Realisasi Renja Disperindag Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
				Urusan : Pilihan									
6	**1**	**1**		**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**	**Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**

					Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	**4**	**3**	**3**	**3**	**100**	**3**	**3**	**75,00**
6	**1**	**1**	**1**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan (orang)	660	132	132	132	100	132	396	60,00
6	**1**	**1**	**2**	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan (orang)	660	132	132	132	100	132	396	60,00
6	**1**	**1**	**3**	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur PD yang meningkat kapasitasnya (orang)	195	8	10	10	100	20	38	19,49
6	**1**	**1**	**4**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan PD dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah PD diatas 85% (dokumen)	11	2	2	2	100	4	8	72,73

6	**1**	**1**	**5**	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD dengan realisasi target diatas 90% (jenis dokumen)	25	5	5	5	100	5	15	60,00
6	**1**	**1**	**6**	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pegawai (orang)	402	134	0	0	#DIV/0!	0	134	33,33
6	**1**	**2**		**Program Pengembangan Perdagangan**	**Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)**	**4.310.000**	**862.000**	**862.000**	**619.141,19**	**71,83**	**862.000**	**2.343.141,19**	**54,37**
					Persentase Rumah Tangga Miskin yang bekerja di sektor Perdagangan	**50**	**0**	**10**	**0**	**0**	**10**	**10**	**20**
					Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	**100**	**79**	**83**	**83**	**100**	**89**	**89**	**89,00**
					Persentase peningkatan	**100**	**2,30**	**63**	**0**	**0**	**12**	**14,3**	**14,30**

					sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun								
					Persentase Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan	**100**	**0**	**20**	**20**	**100**	**40**	**60**	**60,00**
					Pertumbuhan Komoditi yang terjual melalui pasar lelang	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**25,00**
					Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	**50**	**0**	**10**	**10**	**100**	**10**	**20**	**40,00**
6	**1**	**2**	**1**	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pelaksanaan (kali)	270	30	30	41	136,67	50	121	44,81
6	**1**	**2**	**2**	Operasi Pasar Murah	Jumlah Masyarakat (KK)	150000	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	**1**	**2**	**3**	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pelaku usaha	250	22	45	37	82,22	50	109	43,60
6	**1**	**2**	**4**	Pengadaan lahan dan Pembangunan PUJASERA	jumlah lahan yang dibebaskan (lahan)	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00

6	**1**	**2**	**5**	Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Jumlah gudang yang diadakan, gudang terbangun dan sistem resi gudang yang dijalankan/terkelola (bangunan dan sistem resi gudang)	13	2	1	1	100	0	3	23,08
6	**1**	**2**	**6**	Pembinaan monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)	300	40	40	40	100	0	80	26,67
					Jumlah Distributor dan Pelaku Usaha yang di monitoring	45	0	0	0	#DIV/0!	45	45	100,00
6	**1**	**2**	**7**	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	Jumlah Keikutsertaan	72	0	3	3	100	0	3	4,17
					Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi akses pasar	15	0	0	0	#DIV/0!	15	15	100,00
6	**1**	**2**	**8**	Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	Jumlah orang (Orang)	960	170	0	0	#DIV/0!	0	170	17,71

6	**1**	**2**	**9**	Informasi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya	80	0	20	20	100	20	40	50,00
6	**1**	**2**	**10**	Partisipasi Pepper Day	Terlaksananya Kegiatan Partisipasi (orang)	1000	200	11	17	154,55	0	217	21,70
6	**1**	**2**	**11**	Peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor perikanan	Jumlah Pelaku usaha (Pelaku usaha)	250	30	0	0	#DIV/0!	0	30	12,00
6	**1**	**2**	**12**	Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri	jumlah peserta (Pelaku usaha)	250	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	**1**	**2**	**13**	Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi	Jumlah penyelenggaraan (kali)	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	**1**	**2**	**14**	Pengadaan Gerobak	Jumlah gerobak (unit)	80	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	**1**	**2**	**15**	Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	Jumlah Orang	960	0	10	10	100	10	20	2,08
6	**1**	**3**		**Program Pengembangan**	**Jumlah industri yang**	**75**	**15**	**15**	**18**	**120**	**15**	**48**	**64,00**

				Wilayah dan Pegawasan Industri	**memenuhi standar**								
					Jumlah Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra	**4**	**0**	**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**50,00**
6	**1**	**3**	**1**	Finalisasi RPIP	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	1	0	0	#DIV/0!	0	1	100,00
6	**1**	**3**	**2**	Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	5	1	1	1	100	0	2	40,00
6	**1**	**3**	**3**	Pengembangan Kawasan stategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Dokumen yang Tersususun (Dokumen)	5	0	0	0	#DIV/0!	1	1	20,00
6	**1**	**3**	**4**	Monev Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Dokumen yang tersususun (dokumen)	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	**1**	**3**	**5**	Pembinaan Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Lokasi Pembinaan (Lokasi)	8	0	0	0	#DIV/0!	4	4	50,00
6	**1**	**3**	**6**	Penyusunan Profil Kawasan	Jumlah Profil yang tersusun (buku)	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00

				Strategis/kawasan Industri/sentra									
6	**1**	**3**	**7**	Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan pembentukan sentra industri (lokasi)	9	1	2	2	100	0	3	33,33
6	**1**	**3**	**8**	Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku yang disusun	4	0	1	1	100	1	2	50,00
6	**1**	**3**	**9**	Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)	5	3	1	9	900	0	12	240,00
6	**1**	**3**	**10**	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah Industri yang diawasi (Industri)	258	58	50	50	100	50	158	61,24
6	**1**	**3**	**11**	Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri	Jumlah Peserta yang memahami standar produk industri	340	0	60	60	100	0	60	17,65
6	**1**	**4**		**Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi dan Akses Industri**	**Persentase Tenaga kerja industri terhadap total tenaga kerja**	**26,20**	**5,9**	**5,17**	**5,17**	**100**	**5,24**	**16,31**	**62,25**

					Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	**3,55**	**2,2**	**0,70**	**0,70**	**100**	**0,71**	**3,61**	**101,69**
					Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	**1,694**	**0,3**	**0,319**	**0,319**	**100**	**0,333**	**0,952**	**56,20**
					Persentase Industri yang memiliki informasi Kandungan nutrisi Olahan Pangan	**34,98**	**0,82**	**4,68**	**4,68**	**100**	**6,71**	**12,21**	**34,91**
					Pertumbuhan Industri pada Sektor Pertanian (unit)	**7.620**	**1.497**	**1.499**	**1.499**	**100**	**1.524**	**4.520**	**59,32**
					Persentase Tenaga Kerja Industri pada Sektor Pertanian (%)	**52,16**	**15,60**	**10,28**	**10,28**	**100**	**10,44**	**36,32**	**69,63**
					Pertumbuhan industri turunaan	**23**	**4**	**4**	**4**	**100**	**5**	**13**	**56,52**

					Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan								
					Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan pertambangan	**5,180**	**0,050**	**1,035**	**1,035**	**100**	**1,036**	**2,121**	**40,95**
6	**1**	**4**	**1**	Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP	jumlah pelaku industri (pelaku industri)	1686	210	0	0	#DIV/0!	0	210	12,46
6	**1**	**4**	**2**	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih (pelaku industri/masyarakat)	580	125	80	80	100	170	375	64,66
6	**1**	**4**	**3**	Inkubator Wirausaha baru	Jumlah Kelompok	19	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	**1**	**4**	**4**	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Jumlah Pelaku industri yang terfasilitasi	4.050	610	700	700	100	550	1860	45,93
6	**1**	**4**	**5**	Rumah Pengembangan Produk	Jumlah pelaku industri yang terfasilitasi	2280	400	400	400	100	450	1250	54,82
6	**1**	**4**	**6**	Lomba Industri Kreatif	Jumlah Produk Kreatif	156	21	30	30	100	0	51	32,69

6	**1**	**4**	**7**	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Jumlah OVOP	43	3	9	9	100	9	21	48,84
6	**1**	**4**	**8**	Promosi/Gelar Produk Industri	Jumlah event	45	20	9	15	166,67	0	35	77,78
6	**1**	**4**	**9**	Pemberdayaan Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/masyarakat	2.550	500	500	500	100	500	1500	58,82
6	**1**	**4**	**10**	Seminar Halal Internasional	Jumlah Peserta	500	100	0	0	#DIV/0!	0	100	20,00
6	**1**	**4**	**11**	Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Teknologi Tepat Guna	11	0	0	0	#DIV/0!	2	2	18,18
6	**1**	**4**	**12**	Fasilitasi Uji Nutrisi	Jumlah produk yang memiliki informasi nutrisi	600	0	120	120	100	0	120	20,00
6	**1**	**5**		**Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian**	**Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI**	**100**	**10**	**14**	**14**	**100**	**18**	**42**	**42,00**

					wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)								
					Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	**34**	**43,9**	**22**	**43,34**	**197**	**25**	**43,34**	**127,47**
					Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrologian yang memenuhi standar	**100**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0,00**
6	**1**	**5**	**1**	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah (barang/Jasa)	50	10	10	10	100	16	36	72,00
6	**1**	**5**	**2**	Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah kab/Kota (koordinasi)	35	7	0	0	#DIV/0!	7	14	40,00
6	**1**	**5**	**3**	Peringatan Hari Konsumen Nasional	Jumlah Peserta (orang)	1500	500	0	0	#DIV/0!	0	500	33,33
6	**1**	**5**	**4**	Survey Pengukuran Indeks	Jumlah Konsumen (responden)	2000	400	400	400	100	400	1200	60,00

				Keberdayaan Konsumen									
6	**1**	**5**	**5**	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen	134	0	36	36	100	34	70	52,24
6	**1**	**5**	**6**	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Jumlah Peserta	1830	0	100	100	100	100	200	10,93
6	**1**	**5**	**7**	Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	Kasus	14	0	1	0	0	1	1	7,14
6	**1**	**5**	**8**	Pengawasan Tertib Niaga	Jumlah Pengawasan	98	0	14	14	100	25	39	39,80
6	**1**	**6**		**Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk**	**Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian**	**82**	**18**	**18**	**18**	**100**	**18**	**54**	**65,85**

6	**1**	**6**	**1**	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Jumlah orang (aparatur)	115	23	26	26	100	23	72	62,61
6	**1**	**6**	**2**	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Jumlah ruang lingkup	19	2	3	2	66,67	2	6	31,58
6	**1**	**6**	**3**	Monitoring Mutu Pengujian	Jumlah laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
6	**1**	**6**	**4**	Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	Jumlah personil (aparatur)	60	8	10	10	100	0	18	30,00
6	**1**	**6**	**5**	Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta (Peserta)	200	0	200	200	100	0	200	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas perindustrian dan Perdagangan; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Evaluasi dan hasil analisis pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Disperindag				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Persentase Kawasan Industri Dan Sikim		Jumlah Kawasan dan SIKIM/Jumlah Target 5 Tahun x 100%	20%	20	0 : 14	25 : 28	0 : 14%	0 : 0			Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di recofusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
2	Persentase Produk Industri yang berdaya saing		Jumlah Produk Industri Berdaya Saing tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Produk Industri Berdaya Saing tahun N-1)*100	20	20	20	20	20	20			
3	Persentase Tenaga kerja Sektor Industri		Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N-1)*100	20	20	20	20	20	20			

4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun (%)		Jumlah Sarana Perdagangan tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Sarana Perdagangan tahun N-1) *100	2.3	1.15	1.15	1.15	0	0			recofusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
5	Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)		Volume Ekspor tahun N	355.746,97	355.746,97	391.321,67	430.453,83	619.141,19	354. 416,37			Penurunan dan pembatasan permintaan barang dari luar negeri karena pelaku usaha di luar negeri membatasi produksi akibat pandemi Covid-19
6	Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Tersedia Setiap Waktu		Koefisien Variasi tahun N) < 11	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100	100%	100%			
7	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib) ;Pelaku Usaha yang diawasi (140 pelaku usaha perdagangan)		Barang dan Jasa diawasi tahun N ÷ Total Barang dan Jasa)*100 dan Pelaku Usaha yang diawasi tahun N	10 ; 18	10 ; 18	14;20	18 ;25	14 ; 26	18 ; 0			recofusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
8	Indek Keberdayaan Konsumen (0-20 = Sadar; 21-40 = Paham; 41-60 = Mampu; 61-80 = Kritis; 81-100 = Berdaya)		Nilai Indeks yang ditetapkan Oleh kementerian Perdagangan	35	35	37	40	43,34	43,34			Refocusing Anggaran sehingga capaian tahun 2020 masih menggunakan capaian tahun 2019
9	Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yang diuji		Jumlah Komoditi yang diuji tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Komoditi tahun N-1)*100			33,33	33,33	18	42			
10	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)		Nilai SAKIP	3	3	3	4	4	4			

11	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		(Tingkat Pelayanan tahun N ÷ Tingkat Pelayanan tahun N-1)*100	100	100	100	100	100	100			

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Disperindag				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Persentase pertumbuhan jumlah industri		Jumlah Industri (N) - Jumlah Industri (N-1)/ Jumlah Industri (N) X 100%				2			2	3	
2	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri		Jumlah Industri sesuai IUI (N)/ Jumlah Industri sesuai IUI (Babel=50) x 100%				30			30	80	
3	Persentase data informasi industri di SIINAS		Jumlah informasi industri di SIINAS (sd.N)/ Jumlah informasi industri di SIINAS (Babel=76) x 100%				70			70	90	
4	Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya		Jumlah Pelaku Usaha (N)/ Jumlah Pelaku Usaha				100			100	100	

			(Babel=3) x 100%									
5	Persentase Barang terdistribusi		Jumlah terdistribusi (N)/ Jumlah dikelola (babel=200Ton) x 100%				60			60	65	
6	Persentase ketersedian Bapokting		Jumlah barang (N)/ Jumlah bapokting (babel=18) x 100%				80			80	85	
7	Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi		Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi				70			70	75	
8	Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)		Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)				900			900	1000	
9	Indeks Keberdayaan Konsumen		Nilai Iindeks (N)				40			40	42	
10	Persentase Layanan Terstandarisasi		Jumlah Ruang Lingkup (N)/ Jumlah Ruang Lingkup (=4) x 100%				75			75	100	
11	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri		Jumlah produk,yg dipasarkan (N)/ Jumlah produk,yg dipasarkan				40			40	60	

			(babel=9) x 100%									
12	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi		Nilai SAKIP (N)				80			80	82	
13	Survey Kepuasan Pelayanan Internal		Nilai Survey				80			80	85	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2017 – 2022, beberapa isu – isu strategis yang diperkirakan berpengaruh terhadap aktivitas industri dan perdagangan Provinsi Bangka Belitung adalah:

2.3.1 Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

1. Masih rendahnya nilai tambah sektor Industri Pengolahan

a. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukkan industri
b. Pengembangan Kawasan Industri Sadai masih dalam proses pembangunan
c. Masih belum optimalnya tata kelola industri pengolahan
d. Masih rendahnya pengembangan produk potensial ekspor
e. Belum maksimalnya pemetaan potensi ekspor

Industri paling banyak ditemukan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang. Jumlah Industri Kecil 15.108 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 106 Unit dan Industri Besar sebesar 98 Unit secara total terdapat 15.312 Unit dengan total tenaga kerja di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 52.043 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 18.36 % dari tahun sebelumnya

Pada tahun 2018, Jumlah Industri Kecil 17.024 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 99 Unit dan Industri Besar sebesar 88 Unit secara total terdapat 17.211 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 48.327 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 12.40 % dari tahun sebelumnya. Untuk 88 Industri Besar di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menyerap 8.323 tenaga kerja.

Sekitar 40% Industri Besar dan Sedang ini merupakan Industri yang bergerak di sektor makanan, 23% persen Industri Logam Dasar, dan 15 % Industri Barang Galian Bukan Logam.

Pada tahun 2019, Jumlah Industri Kecil 18.444 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 100 Unit dan Industri Besar sebesar 88 Unit dan secara total terdapat 18.632 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 50.553 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 9.20 % dari tahun sebelumnya. Ada tercatat 88 industri besar dan sedang di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menyerap 8.318 tenaga kerja.

Pada tahun 2020, Jumlah Industri Kecil 20.263 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 140 Unit dan Industri Besar sebesar 53 Unit dan secara total terdapat 20.456 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 58.551 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 9.79 % dari tahun sebelumnya.

2. **Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah**

Peraturan Menteri Perindustrian RI no. 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pasal 3 ayat 2 ”Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas”. Akun SIINas merupakan akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas. Data sementara 47.2% Industri besar di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki akun SIINas, hal ini antara lain disebabkan kurang tanggap pelaku usaha/perusahaan industri dalam perkembangan kebijakan pemerintah, dan masih kurangnya sosialisasi kebijakan di bidang perindustrian khususnya yang terkait dengan SIINas.

3. **Kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas masih rendah**

   Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota, Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, dan Data Lain sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dimana Penyampaian Data Industri dilakukan pada tahap pembangunan sebelum dapat beroperasi secara komersial dan kegiatan produksi secara komersial.

   Data sementara Industri besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyampaikan data industri pada SIINas baru mencapai 5.6%,dan kurang lebih 40% yang menyampaikan data secara offline.

4. **Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) ada yang masih bersifat individu/perorangan/petani langsung.**

   Hal ini disebabkan:

   a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Nomor 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahwa “Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong dan/atau penelitian sesuai

peruntukannya, memiliki izin dari instansi yang berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan;

b. Tidak adanya laporan tertulis dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) tentang realisasi perdagangan bahan berbahaya kepada Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2).

c. Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antar lembaga pengawas didaerah terhadap perdagangan Bahan Berbahaya (B2).

5. **Kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat.**

   a. Kesulitan untuk menentukan efisiensi transportasi yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman barang atau produk hasil produksi.

   b. Kesulitan dengan jarak yang relatif jauh antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam menjalankan proses distribusi suatu produk atau barang. Jarak bisa saja menjadi salah satu permasalahan yang biasa terjadi di dalam proses distribusi barang dagangan dikarenakan faktor jarak atau lamanya waktu tempuh bisa mengakibatkan kerusakan pada barang -yang mengakibatkan kualitas barang menjadi turun- pada saat barang dalam proses perjalanan ke tempat tujuan.

   c. Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antara instansi terkait di pemerintahan Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemantauan dan pengawasan distribusi barang.

6. **Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.**

   a. Kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan terutama saat menjelang dan pelaksanaan HBKN.

   b. Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antara instansi terkait di pemerintahan Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemantauan dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

   c. Besarnya ketergantungan pasokan bapok dari daerah luar provinsi dan masih kurangnya produksi lokal.

d. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan perekonomian daerah dan berkurangnya anggaran pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

7. Adanya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi dan terlambatnya distribusi pupuk.

a. Kurangnya informasi data jumlah pasokan pupuk subsidi dan data penerima/petani pengguna pupuk subsidi.
b. Adanya ketidaksesuaian antara usulan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun oleh kelompok tani dengan alokasi yang diberikan.

8. Belum maksimalnya tata kelola ekspor, pendataan ekspor, promosi dan peningkatan kapasitas SDM dan produk Ekspor

a. Belum adanya pelabuhan ekspor yg representatif;
b. Turunnya harga komoditas;
c. Belum maksimalnya diversifikasi produk ekspor;
d. Belum maksimalnya akses pasar ekspor;
e. Masih rendahnya kapasitas SDM dan produk ekspor;
f. Tingginya biaya transportasi dan logistik untuk komoditi/produk ekspor;
g. Adanya produk ekspor yang belum tercatat sebagai realisasi ekspor dari Bangka Belitung.

Penyebab penurunan nilai ekspor non migas tahun 2018 dan 2019 adalah penurunan nilai ekspor komoditas utama Bangka Belitung, yaitu komoditas timah. Target nilai ekspor produk non migas pada tahun 2018 sebesar 1 700, sementara realisasi ekspor non migas tahun 2018 sebesar (USD juta) 1 563. Hal tersebut disebabkan turunnya jumlah ekspor komoditi timah karena adanya surat edaran bersama ICDX dan ICH tentang pencabutan kewenangan surveyor Indonesia dalam memverifikasi asal usul biji timah.

Produksi yang telah di verifikasi oleh lembaga survei tersebut tidak dapat di ekspor.

Target nilai ekspor produk non migas pada tahun 2019 sebesar 1 688, sementara realisasi ekspor non migas tahun 2019 sebesar (USD juta) 1 294. Hal tersebut disebabkan karena adanya syarat CPI (competent person of Indonesia) dalam pengajuan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Belanja) untuk komoditas timah dan baru ada empat perusahaan eksportir timah yang memenuhi persyaratan tersebut.

Target nilai ekspor produk non migas pada tahun 2020 sebesar 1 835, sementara realisasi ekspor non migas tahun 2020 sebesar (USD juta) 1 189. Di tahun 2020, perusahaan eksportir timah sebanyak 17 perusahaan. Namun karena pandemi Covid-19, buyer di negara tujuan ekspor membatasi permintaan barang, selain pembatasan akses pelabuhan di negara tujuan ekspor. Eksportir juga lebih selektif menerima permintaan dagang menimbang kemampuan buyer untuk memenuhi kewajiban pembayaran di masa pandemi Covid-19.

9. **Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen.**

   dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta rendahnya perilaku komplain atau mengungkapkan keluhan dikalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.

10. **Lingkup Layanan pengujian dan sertifikasi yang masih sangat terbatas**

    a. dikarenakan ketersediaan peralatan untuk pengembangan layanan terstandardisasi sangat terbatas
    b. sinkronisasi regulasi pusat dan daerah yang belum maksimal untuk pemanfaatan layanan laboratorium pengujian didaerah
    c. Layanan pengujian sangat tergantung dengan jumlah produksi komoditi daerah

11. **Belum Optimalnya pemasaran produk-produk lokal pada pasar lokal maupun luar daerah.**
    a. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan dalam pemasaran dan promosi,
    b. Rendahnya kualitas dan daya saing produk daerah yang berorientasi nasional
    c. Kurangnya kreativitas,kapasitas dan kompetensi UMKM terhadap produk dalam negeri

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 2022

Berdasarkan telaah rancangan awal RKPD 2022 dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-8	-10	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				24.175.195.228	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				4.672.971.541
	Urusan PEMERINTAHAN PILIHAN				16.812.816.259	Urusan PEMERINTAHAN PILIHAN				2.276.429.413
	Bidang PERDAGANGAN					Bidang Urusan				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi**	**82**	**192.305.300**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi**	**82**	**79.400.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi**	**12**	**192.305.300**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi**	**12**	**79.400.000**
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	5	185.430.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	5	75.300.000

07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	7	6.875.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	7	4.100.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Survey Kepuasan Pelayanan Internal**	**80**	**16.620.510.959**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Survey Kepuasan Pelayanan Internal**	**80**	**2.197.029.413**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan**	**80**	**13.975.692.959**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan**	**80**	**0**
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	95	13.940.212.459	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	95	
			Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	20 orang/bulan				Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	20 orang/bulan	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah laporan	1	35.480.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		keuangan akhir tahun			n/Semesteran SKPD				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**	**80**	**301.664.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**	**80**	**145.000.000**
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis ATK yang dibeli	10	31.680.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis ATK yang dibeli	10	20.000.000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10	18.150.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6 unit	8.184.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6 unit	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetak	50	16.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetak	50	

			Jumlah penggandaan	40000				Jumlah penggandaan	40000	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	109 eksemplar	7.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	109 eksemplar	
07					-	Penyediaan Bahan/Material				
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	450	26.950.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	450	
			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	516				Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	516	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	7	187.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	7	125.000.000
			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	77				Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	77	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**	**80**	**11.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**	**80**	**0**
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Paket	11.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**	**80**	**2.189.550.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**	**80**	**1.986.700.000**
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat/Barang yang dikirim	127	8.030.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat/Barang yang dikirim	127	5.000.000
			Jumlah Materai	952				Jumlah Materai	952	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	146.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	134.400.000

03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Peralatan Kantor	1 Jasa	3.190.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Peralatan Kantor	1 Jasa	
			Jasa Perlengkapan Kantor	1 Jasa				Jasa Perlengkapan Kantor	1 Jasa	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah pramubakti	29	2.032.030.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah pramubakti	29	1.847.300.000
			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	8				Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	8	
			Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	9				Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	9	
			Jumlah tenaga supir	3				Jumlah tenaga supir	3	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**	**80**	**142.604.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**	**80**	**65.329.413**

01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	4	45.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	4	28.468.312
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	2	58.454.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	2	36.861.101
07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	11.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	
08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor yag terpelihara	1 Paket	26.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor yag terpelihara	1 Paket	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	1 Paket	1.650.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	1 Paket	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.022.420.039	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.022.420.039
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		**Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya**	**1**	**81.760.800**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		**Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya**	**1**	**41.000.000**
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		**Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan**	**3**	**81.760.800**	**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**		**Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan**	**3**	**41.000.000**
02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya		Jumlah Distributor/ Pengecer	3	39.395.400	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya		Jumlah Distributor/ Pengecer	3	20.500.000
03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Jumlah Produk bahan berbahaya	1	42.365.400	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Jumlah Produk bahan berbahaya	1	20.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA		**Persentase Barang terdistribusi**	**0,65**	**258.743.100**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA**		**Persentase Barang terdistribusi**	**0,65**	**209.700.000**

	DISTRIBUSI PERDAGANGAN					**DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		**Jumlah Komoditas yang dikelola (TON)**	**200**	**258.743.100**	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**		**Jumlah Komoditas yang dikelola (TON)**	**200**	**209.700.000**
02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah pengelolaan yang dibina (lokasi)	3	258.743.100	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah pengelolaan yang dibina (lokasi)	3	209.700.000
					-					
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**Persentase ketersedian Bapokting**	**0,85**	**395.091.400**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**Persentase ketersedian Bapokting**	**0,85**	**185.300.000**
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		**Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang**	**18**	**126.682.600**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**		**Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)**	**18**	**33.000.000**

			Penting (jenis)			**di Tingkat Daerah Provinsi**				
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok	8	64.523.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok	8	33.000.000
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Penting	6	62.158.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Penting	6	
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		**Koevisien Variasi**	**<11**	**268.408.800**	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**		**Koevisien Variasi**	**<11**	**152.300.000**

01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Pemantauan harga dan stok	84	73.543.800	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Pemantauan harga dan stok	84	37.550.000
02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Operasi Pasar	14	194.865.000	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Operasi Pasar	14	114.750.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi**	**0,75**	**151.751.600**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi**	**0,75**	**39.595.500**
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk		**Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi**	**11**	**151.751.600**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan**		**Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi**	**11**	**39.595.500**

	Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					**Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**				
01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi		Jumlah Pemeriksaan (dokumen)	11	37.992.900	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi		Jumlah Pemeriksaan (dokumen)	11	
02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengawasan (laporan)	2	39.092.900	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengawasan (laporan)	2	21.000.000
03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		c	11	36.892.900	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		c	11	18.595.500
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		Jumlah Pengawasan (laporan)	2	37.772.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		Jumlah Pengawasan (laporan)	2	
					-					
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		**Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)**	**1000**	**616.922.539**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)**	**1000**	**235.000.000**
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih		**Jumlah Akses Pasar Ekspor**	**3**	**436.487.150**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada**		**Jumlah Akses Pasar Ekspor**	**3**	**120.000.000**

	dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					**lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**				
02	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Produk Siap Ekspor yang dipamerkan	2	53.339.000	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Produk Siap Ekspor yang dipamerkan	2	
03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Permintaan Produk Dagang	6	383.148.150	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Permintaan Produk Dagang	6	120.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		**Jumlah SDM perdagangan yang terlatih**	**45**	**180.435.389**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**		**Jumlah SDM perdagangan yang terlatih**	**45**	**115.000.000**
05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Eksportir/Calon Eksportir	45	180.435.389	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Eksportir/Calon Eksportir	45	115.000.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN		**Indeks Keberdayaan Konsumen**	**42 (Mampu)**	**520.246.100**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN**		**Indeks Keberdayaan Konsumen**	**42 (Mampu)**	**170.500.000**

	PERLINDUNGAN KONSUMEN					**PERLINDUNGAN KONSUMEN**				
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk**	**3**	**105.380.000**	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk**	**3**	**20.500.000**
02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang beroperasional	3	105.380.000	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang beroperasional	3	20.500.000
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Konsumen yang teredukasi**	**440**	**220.567.600**	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Konsumen yang teredukasi**	**440**	**80.000.000**
01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		Jumlah Responden	400	117.385.400	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		Jumlah Responden	400	40.000.000
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen		Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)	40	103.182.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen		Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)	40	40.000.000

	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan**	**1**	**194.298.500**	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan**	**1**	**70.000.000**
01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah Jenis Barang yang diawasi	11	194.298.500	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah Jenis Barang yang diawasi	11	70.000.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		**Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**0,6**	**149.656.100**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**0,6**	**65.000.000**
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		**Jumlah Permintaan Dagang**	**4**	**149.656.100**	**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**		**Jumlah Permintaan Dagang**	**4**	**65.000.000**
01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang	8	149.656.100	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang	8	65.000.000

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.357.609.650	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.357.609.650
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Persentase pertumbuhan jumlah industri**	**0,03**	**2.100.842.150**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase pertumbuhan jumlah industri**	**0,03**	**400.000.000**
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		**Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri**	**0,02**	**2.100.842.150**	**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**		**Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri**	**0,02**	**400.000.000**
02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah IKM OVOP yang dibina	26	163.207.550	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah IKM OVOP yang dibina	26	
03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI	200	638.310.200	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI	200	

04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	2	193.641.800	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	2	
05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda	350	1.105.682.600	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda	350	400.000.000
			Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	80	-			Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	80	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri**	**0,8**	**189.872.100**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		**Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri**	**0,8**	**115.500.000**
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		**Jumlah industri yg dipantau**	**55**	**189.872.100**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)**		**Jumlah industri yg dipantau**	**55**	**115.500.000**

						Kewenangan Provinsi				
01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau	5	92.414.300	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau	5	32.500.000
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi		Jumlah IUI yang diawasi	50	97.457.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi		Jumlah IUI yang diawasi	50	83.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		**Persentase data informasi industri di SIINAS**	**0,9**	**66.895.400**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase data informasi industri di SIINAS**	**0,9**	**0**

	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		**Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap**	**1**	**66.895.400**	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**		**Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap**	**1**	**0**
01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25	66.895.400	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25	
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				**2.023.703.440**	**UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**				**551.746.627**
	Bidang PERDAGANGAN					**Bidang PERDAGANGAN**				
	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Survey Kepuasan Pelayanan Internal**	**80**	**1.195.144.500**	**Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Survey Kepuasan Pelayanan Internal**	**80**	**321.746.627**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan**	**80**	**5.407.600**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan**	**80**	**0**
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	5.407.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian**	**80**	**168.481.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian**	**80**	**0**
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	18	168.481.500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	18	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Survey Kepuasan**	**80**	**349.897.900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**144.700.000**

			Pelayanan Umum							
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	1.650.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	7.315.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	19.700.000
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetak	2 eksemplar	13.172.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetak	2 eksemplar	
			Jumlah penggandaan	30000 lembar				Jumlah penggandaan	30000 lembar	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	125 eksemplar	825.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	125 eksemplar	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	200 Pax	29.260.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	200 Pax	
			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia		
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	63	297.675.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	63	125.000.000

			yang dilaksanakan							
			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	149	Rp -			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	149	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**188.430.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**0**
05	Pengadaan Mebel		Jumlah meubeler yang disediakan	1 Paket	11.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah meubeler yang disediakan	1 Paket	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang tersedia	1 Paket	177.430.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang tersedia	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**166.897.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**147.000.000**
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat/Barang yang dikirim	33	21.697.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat/Barang yang dikirim	33	5.000.000

			Jumlah Materai	110				Jumlah Materai	110	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	145.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	142.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**316.030.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**30.046.627**
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3	47.630.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3	30.046.627
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang tersedia	2	7.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang tersedia	2	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	174.900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	

10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1	85.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1	
	Program STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		**Persentase Layanan Terstandarisasi**	**1**	**828.558.940**	**Program STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**Persentase Layanan Terstandarisasi**	**1**	**230.000.000**
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi**	**0,95**	**828.558.940**	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi**	**0,95**	**230.000.000**
01	Verifikasi Mutu Produk		Jumlah komoditi yang di verifikasi	4	321.627.240	Verifikasi Mutu Produk		Jumlah komoditi yang di verifikasi	4	90.000.000
02	Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Sample yang di uji	250	241.391.700	Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Sample yang di uji	250	70.000.000
04	Pengembangan Layanan Kalibrasi		Jumlah Alat yang dikalibrasi	10	265.540.000	Pengembangan Layanan Kalibrasi		Jumlah Alat yang dikalibrasi	10	70.000.000

	UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN				**806.894.240**	**UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN**				**383.200.000**
	Bidang PERDAGANGAN					**Bidang PERDAGANGAN**				
	Program PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		**Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**0,6**	**106.914.500**	**Program PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**0,6**	**50.000.000**
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		**Jumlah Produk yang Siap dipasarkan**	**20**	**106.914.500**	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**		**Jumlah Produk yang Siap dipasarkan**	**20**	**50.000.000**
01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Fasilitasi Produk	20	106.914.500	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Fasilitasi Produk	20	50.000.000
	Bidang PERINDUSTRIAN					**Bidang PERINDUSTRIAN**				
	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Survey Kepuasan Pelayanan Internal**	**80**	**432.492.740**	**Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Survey Kepuasan Pelayanan Internal**	**80**	**223.200.000**

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan**	**80**	**9.047.500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan**	**80**	**0**
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	9.047.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian**	**80**	**46.354.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian**	**80**	**0**
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	4	46.354.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	4	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**122.306.800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**137.100.000**

01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	2.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	13.500.000
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetak	5 Eksemplar	14.300.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetak	5 Eksemplar	
			Jumlah penggandaan	1000 lembar				Jumlah penggandaan	1000 lembar	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12 eksemplar	825.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12 eksemplar	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	12 pax	4.950.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	12 pax	
			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	80 pax				Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	80 pax	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	10	100.031.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	10	123.600.000

			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	24				Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	24	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**96.937.500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**0**
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang tersedia	2 jenis	96.937.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang tersedia	2 jenis	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**92.785.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**86.100.000**
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat/Barang yang dikirim	73	9.625.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat/Barang yang dikirim	73	8.700.000
			Jumlah Materai	200				Jumlah Materai	200	

02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	83.160.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	77.400.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**65.061.940**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80**	**0**
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	54.996.940	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	10.065.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	

	Program PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Persentase pertumbuhan jumlah industri**	**0,05**	**267.487.000**	**Program PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase pertumbuhan jumlah industri**	**0,05**	**110.000.000**
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		**Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri**	**0,02**	**267.487.000**	**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**		**Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri**	**0,02**	**110.000.000**
05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Fasilitasi Produk	200	267.487.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Fasilitasi Produk	200	110.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan memperhatikan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten/Kota melalui Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi zoom oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Usulan Kab/Kota melalui Formulir usulan tahun 2022 yang dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usulan kegiatan yang diakomodir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti yang tersaji pada tabel 2.5.1 dibawah ini:

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

POKIR DPRD TAHUN 2022

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan
					Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengawasan Gas Elpiji 3Kg			✓		dilaksanakan pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

USULAN MASYARAKAT TAHUN 2022

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan
					Diakomodir	Tidak Diakomodir	
	-	-	-	-	-	-	-

B A B III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah Kebijakan Industri Nasional dalam jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. Sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

1. Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional
2. IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar
3. Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam)
4. Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar
5. Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan
6. Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC.

Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa strategic outcomes yang terdiri dari:

1. Meningkatnya nilai tambah industri
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
4. Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan
5. Menguat dan lengkapnya struktur industri
6. Meningkatnya persebaran pembangunan industri, serta
7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu "*Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing ".*

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Perdagangan;
   Dari Tujuan diatas akan dicapai dengan 2 (dua) Sasaran yaitu :
   1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Industri;
   2. Meningkatnya Neraca Perdagangan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan 2 (dua) Urusan Pilihan, yaitu : Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 dan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D). dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
    1. Penyesuaian terhadap Permendagri 90 tahun 2019
    2. Penyesuaian terhadap Kepmendagri 050-3708
    3. Pencapaian Visi Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
    1. Terdapat 10 Program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2022
    2. Terdapat 22 Kegiatan yang masing-masing mendukung program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022
    3. Terdapat 81 Sub Kegiatan yang masing-masing mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022
    4. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan di Provinsi dan 7 Kab/Kota

c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

    Penyesuaian Sub Kegiatan Pada Administrasi Umum Sesuai Kesepakatan Pembahasan dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih jelas rencana program dan kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disperindag Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (Tahun Rencana)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bidang Urusan								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi**		**82**	**79.400.000**				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi**		**12**	**79.400.000**				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD		5	75.300.000				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD		7	4.100.000				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Survey Kepuasan Pelayanan Internal**		**80**	**2.197.029.413**				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan**		**80**	**0**				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		95					
	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja		20 orang/bulan					
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1					

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**		**80**	**145.000.000**				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia		10					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dibeli		10	20.000.000				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia		10					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia		6 unit					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak		50					
	Jumlah penggandaan		40000					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia		109 eksemplar					
Penyediaan Bahan/Material								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia		450					
	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia		516					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan		7	125.000.000				
	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan		77					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**		**80**	**0**				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan		1 Paket					

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**		**80**	**1.986.700.000**				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim		127	5.000.000				
	Jumlah Materai		952					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan		12	134.400.000				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan Kantor		1 Jasa					
	Jasa Perlengkapan Kantor		1 Jasa					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pramubakti		29	1.847.300.000				
	Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor		8					
	Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan		9					
	Jumlah tenaga supir		3					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**survey kepuasan pelayanan umum (angka)**		**80**	**65.329.413**				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara		4	28.468.312				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara		2	36.861.101				
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		1 Paket					
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor yag terpelihara		1 Paket					

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara		1 Paket					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.022.420.039				
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya**		**1**	**41.000.000**				
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	**Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan**		**3**	**41.000.000**				
Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Distributor/ Pengecer		3	20.500.000				
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Produk bahan berbahaya		1	20.500.000				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase Barang terdistribusi**		**0,65**	**209.700.000**				
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	**Jumlah Komoditas yang dikelola (TON)**		**200**	**209.700.000**				
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pengelolaan yang dibina (lokasi)		3	209.700.000				
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase ketersedian Bapokting**		**0,85**	**185.300.000**				

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)**		**18**	**33.000.000**				
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok		8	33.000.000				
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Penting		6					
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	**Koevisien Variasi**		**<11**	**152.300.000**				
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan harga dan stok		84	37.550.000				
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar		14	114.750.000				
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi**		**0,75**	**39.595.500**				
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	**Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi**		**11**	**39.595.500**				

Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Pemeriksaan (dokumen)		11					
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan (laporan)		2	21.000.000				
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Distributor/pengecer Pupuk bersubsidi yang diawasi (laporan)		11	18.595.500				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan (laporan)		2					
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)**		**1000**	**235.000.000**				
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	**Jumlah Akses Pasar Ekspor**		**3**	**120.000.000**				
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Produk Siap Ekspor yang dipamerkan		2					
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Permintaan Produk Dagang		6	120.000.000				
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	**Jumlah SDM perdagangan yang terlatih**		**45**	**115.000.000**				
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir/Calon Eksportir		45	115.000.000				
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Indeks Keberdayaan Konsumen**		**42 (Mampu)**	**170.500.000**				

Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk**		**3**	**20.500.000**				
Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang beroperasional		3	20.500.000				
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Konsumen yang teredukasi**		**440**	**80.000.000**				
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Responden		400	40.000.000				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)		40	40.000.000				
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan**		**1**	**70.000.000**				
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Jenis Barang yang diawasi		11	70.000.000				
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri**		**0,6**	**65.000.000**				
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	**Jumlah Permintaan Dagang**		**4**	**65.000.000**				
Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang		8	65.000.000				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.357.609.650				

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase pertumbuhan jumlah industri**		**0,03**	**400.000.000**				
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	**Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri**		**0,02**	**400.000.000**				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM OVOP yang dibina		26					
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI		200					
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna		2					
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda		350	400.000.000				
	Jumlah SDM Indutsri yang terlatih		80					
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri**		**0,8**	**115.500.000**				
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	**Jumlah industri yg dipantau**		**55**	**115.500.000**				
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau		5	32.500.000				

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah IUI yang diawasi		50	83.000.000				
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase data informasi industri di SIINAS**		**0,9**	**0**				
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	**Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap**		**1**	**0**				
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS		25					
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				**Rp551.746.627**				
Bidang PERDAGANGAN								
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Survey Kepuasan Pelayanan Internal**		**80**	**321.746.627**				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan**		**80**	**0**				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian**		**80**	**0**				

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal		18					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**		**80**	**144.700.000**				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia		10					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	19.700.000				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak		2 eksemplar					
	Jumlah penggandaan		30000 lembar					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia		125 eksemplar					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia		200 Pax					
	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan		63	125.000.000				
	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan		149					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**		**80**	**0**				
Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang disediakan		1 Paket					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang tersedia		1 Paket					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**		**80**	**147.000.000**				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim		33	5.000.000				
	Jumlah Materai		110					

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan		12	142.000.000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**		**80**	**30.046.627**				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara		3	30.046.627				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang tersedia		2					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara		1					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		1					
Program STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase Layanan Terstandarisasi**		**1**	**230.000.000**				
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi**		**0,95**	**230.000.000**				
Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi yang di verifikasi		4	90.000.000				
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Sample yang di uji		250	70.000.000				
Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Alat yang dikalibrasi		10	70.000.000				
UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN				**Rp383.200.000**				
Bidang PERDAGANGAN								

Program PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri**		**0,6**	**50.000.000**				
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah Produk yang Siap dipasarkan**		**20**	**50.000.000**				
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Produk		20	50.000.000				
Bidang PERINDUSTRIAN								
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Survey Kepuasan Pelayanan Internal**		**80**	**223.200.000**				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan**		**80**	**0**				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian**		**80**	**0**				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal		4					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**		**80**	**137.100.000**				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia		10					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	13.500.000				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak		5 Eksemplar					

	Jumlah penggandaan		1000 lembar					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia		12 eksemplar					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia		12 pax					
	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia		80 pax					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan		10	123.600.000				
	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan		24					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**		**80**	**0**				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang tersedia		2 jenis					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**		**80**	**86.100.000**				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim		73	8.700.000				
	Jumlah Materai		200					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan		12	77.400.000				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**		**80**	**0**				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara		1					

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		4 Unit					
Program PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase pertumbuhan jumlah industri**		**0,05**	**110.000.000**				
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	**Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri**		**0,02**	**110.000.000**				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Produk		200	110.000.000				

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Dengan adanya Rencana Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Fungsi Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah sebagai pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2022.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp : 0717 – 439 093 Web : http://perindag.babelprov.go.id
Fax : 0717 – 439 093 email : perindag@babelprov.go.id